

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi isu permasalahan kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Bapennas (2020) menyatakan bahwa terdapat 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana salah satunya terdapat tujuan tanpa kemiskinan yang merupakan tujuan nomor satu yang diterangkan pada sidang umum PBB. Bagaimana tidak, kemiskinan merupakan permasalahan yang berasal dari faktor ekonomi di mana seseorang ataupun kelompok tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang sifatnya mendasar, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang baik (Fitriani et al., 2020).

Kemiskinan merupakan penyakit dalam ekonomi, yang mana paling tidak harus dikurangi. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, selalu memberi perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, terutama khusus daerah relatif tertinggal. Berbagai kebijakan program kerja telah dilakukan guna mengentaskan kemiskinan, sayangnya belum memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu agar permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan dengan tuntas (Aziz et al., 2016).

Menurut Lindriyanti (2020), faktor penyebab kemiskinan berdasarkan teori Lingkaran Setan Kemiskinan yaitu, pertama secara makro kemiskinan muncul sebab ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan,

nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal.

Tingkat kemiskinan Indonesia baik secara individu maupun wilayah masih relatif tinggi. Kasriyati (2018) menjelaskan tiga karakteristik umum dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Pertama, sebagian besar rumah tangga ada di dekat garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang rawan terhadap kemiskinan. Kedua, di Indonesia kemiskinan tidak memperhitungkan garis kemiskinan yang sesungguhnya, unsur pendapatan menjadi ukuran dasar kemiskinan. Ketiga, luasnya wilayah dan beragam perbedaan, menjadi karakteristik dasar kemiskinan di Indonesia.

Kepulauan Nias merupakan gugusan pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, Kepulauan Nias berada di antara 1°-6° Lintang Utara dan 97°-32° Bujur Timur, berdekatan dengan garis khatulistiwa. Wilayah ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan banyaknya pulau-pulau. Secara administratif, Kepulauan Nias terdiri atas lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di wilayah tersebut.

Kepulauan Nias terkenal dengan potensi sumber daya alam yang potensial yang perlu dikembangkan. Dikutip dari Liputan6.com (2016) Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa potensi terbesar di Kepulauan Nias berada di sektor pariwisata dan perikanan. Sekitar 10% produksi perikanan tangkap Sumut berasal dari Nias, dan sektor Pariwisata yang mendunia seperti sport surfing di Pantai Sorake dan Lagundri, serta snorkling, diving, hingga eksplorasi pantai eksotik Tureloto dan kawasan ekowisata mangrove (Aulia et al., 2020). Adapun Kepulauan Nias memiliki potensi hasil pertanian yang besar, seperti tanaman pangan; padi sawah dengan produksi 117.327 ton, jagung 2.732 ton, umbi-umbian sekitar 70.000 ton per tahun, serta kelapa, karet, dan kakao dengan luas panen 12.974 ha. Sekitar 90%

masyarakat tinggal di pedesaan menggantungkan hidupnya pada sektor ini (Halawa, 2023). Wilayah Kepulauan Nias secara geografis didominasi perbukitan dan pedalaman, membuat wilayah ini sulit dijangkau. Infrastruktur di wilayah ini tingkat aksesibilitasnya juga masih sangat terbatas. Sehingga potensi ekonomi tidak bisa berkembang secara maksimal, kesejahteraan masyarakat belum tercapai bahkan rentan terhadap kemiskinan.

Kondisi ini memperlihatkan wilayah di Kepulauan Nias cukup memprihatinkan, empat kabupaten secara konsisten ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Adapun salah satu indikator ketertinggalan yaitu persentase penduduk miskin (Dachi et al., 2022). Sejumlah wilayah di Kepulauan Nias memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem, sehingga upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin penting mengingat kerentanan masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul.

Tabel 1. 1 Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kepulauan Nias Tahun 2023

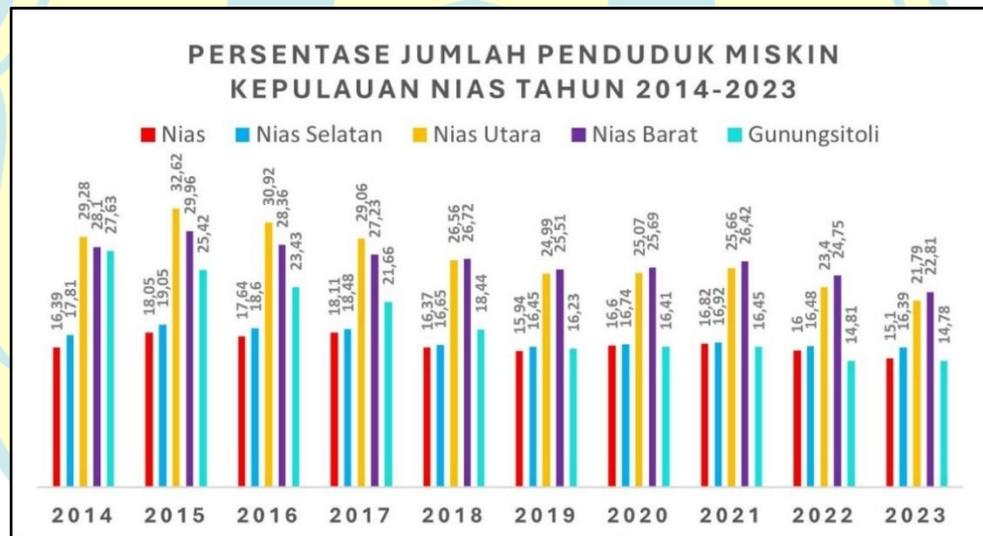
Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Nias	15,10	1,95	0,40
Nias Selatan	16,39	3,04	0,84
Nias Utara	21,79	2,52	0,59
Nias Barat	22,81	2,08	0,34
Gunungsitoli	14,78	2,08	0,46
Rata-Rata Kepulauan Nias	18,17	2,33	0,53
Sumatera Utara	8,15	1,26	0,32

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah penulis

Seperti pada tabel 1.1 yang disajikan, bahwa Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias memiliki rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 18,17%, angka ini lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 8,15%. Kabupaten Nias Barat menjadi kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi mencapai 22,81%.

Sementara itu, Kota Gunungsitoli memiliki angka kemiskinan terendah di Kepulauan Nias (14,78%), namun angka ini tetap hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Begitupun indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kepulauan Nias mencerminkan angka yang lebih tinggi dibanding tingkat provinsi yaitu masing-masing sebesar 2,33 dan 0,53. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh daerah Kepulauan Nias merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun pergerakan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias dari tahun 2014-2023 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan Nias

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah penulis

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Kepulauan Nias tergolong fluktuatif. Tahun 2015 angka kemiskinan di seluruh kabupaten Kepulauan Nias meningkat, kecuali Kota Gunungsitoli yang justru turun menjadi 25,42%. Di tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota mengalami kenaikan akibat efek dari Pandemi Covid-19, dengan angka kemiskinan tertinggi berada di Kab. Nias Barat sebesar 26,42% dan terendah Kota Gunungsitoli sebesar 16,45% di tahun 2021. Setelahnya, tahun 2022 hingga 2023 kemiskinan turun kembali. Ini membuktikan bahwa terdapat upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di

Kabupaten/Kota Kepulauan Nias. Akan tetapi, angka kemiskinan ini masih sangat tinggi. Tambunan (2019) menjelaskan bahwa hal yang sangat penting dilakukan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ialah dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan itu sendiri.

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Sumber daya manusia yang tidak memadai dapat berpengaruh pada tingkat kemiskinan, karena peningkatan investasi pada sumber daya manusia dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Collin & Weil, 2020). Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2010) salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang. Kualitas pendidikan masyarakat dalam penelitian dilihat melalui rata-rata lama sekolah atau rata-rata tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk usia 25 tahun ke atas.

Tabel 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Kepulauan Nias Tahun 2014-2023

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah				
	Nias	Nias Selatan	Nias Utara	Nias Barat	Gunungsitoli
2014	4,75	4,64	6,05	5,73	8,17
2015	4,76	4,64	6,06	5,74	8,18
2016	4,92	4,65	6,07	5,77	8,20
2017	4,93	4,95	6,08	5,78	8,40
2018	4,94	5,20	6,09	6,00	8,41
2019	5,15	5,53	6,25	6,14	8,58
2020	5,36	5,85	6,58	6,49	8,61
2021	5,64	6,06	6,77	6,69	8,62
2022	5,88	6,23	6,78	6,97	8,64
2023	6,14	6,48	6,85	7,07	8,65

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah penulis

Berdasarkan data dari BPS, selama sepuluh tahun berturut-turut rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota kepulauan nias terus mengalami peningkatan. Di posisi tertinggi yaitu Kota Gunungsitoli yang mencapai rata-rata lama sekolah 8,65 tahun pada 2023, Artinya masyarakat umumnya

mencapai pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama, namun belum mencapai ambang batas Sekolah Menengah Pertama yaitu 9 tahun. Adapun di tingkat kabupaten yaitu kabupaten Nias menempati posisi terendah dengan rata-rata lama sekolah hanya mencapai 6,14 tahun. Disusul kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara, serta Nias Barat yang mencapai 7,07 tahun pada 2023, Pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat. Mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu upayanya, namun untuk mencapai rata-rata durasi pendidikan yang tinggi diperlukan keterlibatan dari semua pihak.

Penelitian oleh Margareni et al. (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, artinya pendidikan berpotensi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Vendison (2022) yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan adanya ketidakmerataan akses terhadap pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Daerah berpendapatan rendah dan juga tingkat pertumbuhan yang rendah, akan memiliki struktur ekonomi yang asimetris dalam hal pertumbuhan pendapatan dan kondisi ini berpotensi menyebabkan daerah tersebut tetap berada dalam jebakan kemiskinan (Lee & Kim, 2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan PDRB mencerminkan bahwa perekonomian suatu daerah berarti sedang tumbuh dan berkembang.

Tabel 1. 3 PDRB Kabupaten/Kota Kepulauan Nias Tahun 2014 - 2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)				
	Nias	Nias Selatan	Nias Utara	Nias Barat	Gunungsitoli
2014	1.992,05	3.356,39	1.853,28	973,76	2.564,37
2015	2.108,04	3.505,19	1.954,12	1.024,93	2.712,86
2016	2.214,15	3.659,77	2.043,91	1.074,48	2.876,34
2017	2.325,01	3.826,62	2.134,49	1.126,19	3.049,12
2018	2.440,16	4.018,74	2.228,75	1.179,91	3.232,97
2019	2.563,03	4.221,04	2.332,44	1.236,73	3.428,45
2020	2.609,14	4.246,83	2.369,36	1.257,28	3.441,65
2021	2.666,86	4.332,63	2.417,20	1.285,70	3.519,13
2022	2.748,38	4.466,09	2.490,49	1.324,42	3.628,53
2023	2.853,24	4.629,30	2.584,78	1.373,71	3.762,59

Sumber: BPS, data diolah penulis

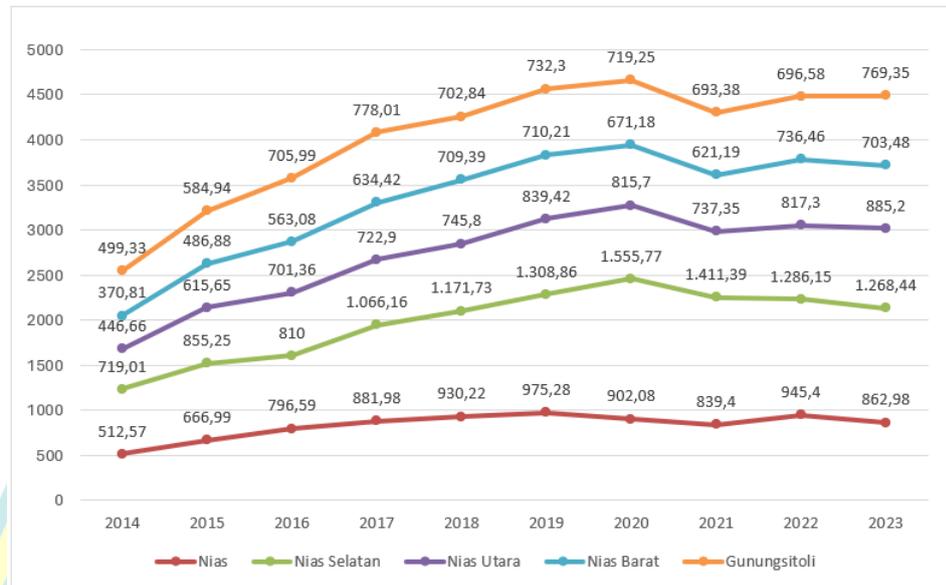
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota Kepulauan Nias mengalami pertumbuhan ekonomi positif selama 10 tahun terakhir. Kota Gunungsitoli mengalami pertumbuhan rata-rata tertinggi, yakni 4,45 persen per tahun hingga mencapai angka 3.762,59 miliar di 2023 dan Kabupaten Nias Utara memiliki pertumbuhan rata-rata paling rendah, yakni 3,57 persen per tahun. Menurut data dari BPS, sumbangsih sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB tahun 2023 di tingkat kabupaten mencapai sebesar di atas 50%. Kemudian sektor dominan berikutnya Perdagangan besar, dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruksi. Meskipun mengalami pertumbuhan, namun pada tahun 2015, 2020, dan 2021 angka kemiskinan justru meningkat. Ini menandakan bahwa pertumbuhan PDRB perlu didukung dengan pemerataan pendapatan, agar dampaknya terasa bagi masyarakat miskin.

Menurut Siregar (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Namun, agar pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*), yaitu dalam hal ini kenaikan PDRB harus merata ke seluruh lapisan pendapatan, termasuk kalangan masyarakat miskin, artinya untuk dapat mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi perlu terjadi di sektor-sektor yang menjadi tempat beraktivitas banyaknya masyarakat penduduk miskin (Perwitasari et al., 2023).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitriany (2021) menyatakan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kota Dumai, yang mana meningkatnya PDRB akan menurunkan angka kemiskinan. Namun, penelitian oleh Harlan (2023), menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Lampung yang mana meningkatnya PDRB sejalan dengan meningkatnya angka kemiskinan. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat tidak merata, sehingga hanya sebagian kelompok yang merasakan manfaatnya.

Rambe et al., (2022) menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana caranya pemerintah mengombinasikan dengan belanja yang efisien dan distribusi yang efektif akan mengurangi kemiskinan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib daerah itu sendiri. Tujuan utama dalam alokasi belanja daerah adalah pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Realisasi belanja daerah mencerminkan sejauh mana anggaran digunakan secara nyata di lapangan, sehingga berpotensi besar dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Ketepatan dan efektivitas belanja daerah dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat diyakini dapat mempercepat pengurangan kemiskinan. Namun demikian, tingginya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Dalam banyak kasus, terdapat belanja daerah yang realisasinya tidak maksimal atau tidak tepat sasaran. Seperti yang dikatakan oleh Paulus et al. (2017) belanja yang tidak sesuai sasaran dan tidak optimal bisa justru mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan.



Gambar 1. 2 Tren Realisasi Belanja Daerah

Sumber: Data DJPK Kemenkeu, diolah penulis

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2014 – 2023. Adapun berdasarkan data DJPK Kemenkeu, efektivitas realisasi belanja daerah terhadap pagu anggaran di wilayah Kepulauan Nias menunjukkan berbagai variasi. Seperti, Kabupaten Nias beberapa kali mencatat realisasi di atas 100%, seperti pada tahun 2015 dan tahun 2019 sebesar 975,28 miliar dari pagu 834,86 miliar (116,82%). Sebaliknya, Kabupaten Nias Selatan cenderung mengalami kendala dalam serapan anggaran, misalnya pada tahun 2016 yang hanya terealisasi 810 miliar dari pagu Rp1.093,58 miliar (74,07%). Sementara Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat menunjukkan fluktuasi dengan beberapa tahun mencatat realisasi di bawah 90%.

Ketidakefisienan dalam realisasi anggaran menjadi catatan penting, mengingat belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Meskipun pagu anggaran cenderung meningkat setiap tahun, hal ini tidak selalu diikuti dengan realisasi yang optimal. Perbedaan efektivitas ini berpotensi mencerminkan tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran di masing-

masing daerah. Secara teoritis, semakin tinggi realisasi belanja daerah yang dikelola dengan baik dan diarahkan pada sektor-sektor produktif, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta berdampak pada penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah (Wahyudi et al., 2017).

Berdasarkan uraian masalah di atas, kemiskinan di Kabupaten/Kota Kepulauan Nias menjadi perhatian penting, karena sebgaaian besar wilayahnya menduduki peringkat tertinggi dalam tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera utara, dan empat dari lima daerah Kepulauan Nias merupakan daerah yang secara konsisten masih ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Terdapat berbagai faktor yang dapat berpotensi mempengaruhi kemiskinan di Kepulauan Nias seperti pendidikan, produk domestik regional bruto, dan peran pemerintah melalui realisasi belanja daerah. Untuk itu, peneliti tertarik membahas “Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias”. Adanya inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, dan juga masih sedikitnya penelitian yang secara khusus dilakukan di wilayah Kabupaten/Kota Kepulauan Nias, sehingga wilayah ini menarik untuk diteliti.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ditemukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias?
2. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias?
3. Apakah terdapat pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias
3. Pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan guna memperoleh manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan rekomendasi bagi para pembaca khususnya yang memiliki minat dalam mempelajari pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana informasi bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan terutama mengenai pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Realisasi Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kepulauan Nias.
- b. Sebagai bahan masukan ataupun landasan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan sebagai perencanaan ke depan khususnya terkait dengan situasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Intelligentia - Dignitas